

PERILAKU POLITIK TRANSAKSI CALON LEGISLATIF DAN PEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KELURAHAN SAKO KOTA PALEMBANG

Dr. Alfitri, M.Si.

Dosen Jurusan Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
E-mail: *al_fitri2002@yahoo.com*

Abstrak

Dalam Pemilihan Umum Legislatif yang digelar tahun ini, ternyata Perilaku politik para caleg dan pemilih semakin cenderung bertransaksi secara politik sehingga melahirkan Perilaku pragmatis para pemilih, terutama pemilih kalangan bawah. Karakter Perilaku politik ini berkaitan dengan semakin tingginya daya tawar pemilih untuk memberikan suara kepada salah satu caleg dengan latar belakang parpol. Tulisan ini akan membahas mengapa para caleg cenderung melakukan transaksi politik dengan para konsituen, dan bagaimana mengurangi Perilaku transaksi politik dalam Pemilu mendatang. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data pengamatan dan wawancara. Informan ditetapkan secara bertujuan dan dilakukan dengan para caleg, ketua RT dan masyarakat pemilih, sedangkan pengamatan dilakukan pada lokasi pemilihan, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Data diolah secara kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan tabel matriks sederhana, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian menyatakan bahwa, Perilaku transaksi politik terjadi karena warga masyarakat pemilih belum merasakan secara signifikan hasil pembangunan yang merupakan produk dari kebijakan publik, Perilaku para wakil rakyat yang masih jauh dari sikap negarawan dan banyaknya permasalahan Perilaku negatif wakil rakyat seperti pelanggaran moralitas, korupsi, hingga tingkat disiplin yang rendah. Untuk mencegah dan mengurangi politik transaksi diperlukan reformasi dan pemberdayaan Parpol serta pendidikan politik warga secara berkesinambungan, agar pemilih semakin cerdas dalam setiap pesta demokrasi.

Kata Kunci: *Perilaku Politik, Transaksi, Calon Legislatif, Pemilih.*

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 telah memasuki masa perhitungan suara sebagai hasil akhir penetapan calon legislatif yang berhak mendapatkan kursi mengisi keanggotaan DPR RI DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD RI. Gambaran para caleg dari berbagai partai politik (Parpol) telah beredar di berbagai media massa, walaupun masih belum pasti, karena belum dilakukan penetapan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pertarungan politik memperebutkan kursi telah selesai, namun pertarungan antar anggota Parpol masih terjadi untuk memperjuangkan mendapatkan kursi di parlemen pusat maupun parlemen lokal. Menjadi pemandangan biasa pada masa kampanye yang menunjukkan suasana marak di jalanan perkotaan dan perdesaan dengan menampilkan poster, spanduk, dan baliho yang memenuhi setiap sudut kota dan desa. Begitu pula kegiatan parpol dengan mengadakan dialog akbar di dalam gedung atau stadion maupun di lapangan terbuka untuk menyampaikan program Parpol agar dapat menarik perhatian pemilih. Ada juga yang menyapa pemilih secara langsung di lapangan dengan *carablusukan* dengan berbagai kreasi kegiatannya seperti pengajian majelis ta'lim, tatap muka langsung dengan warga, peninjauan pasar dan tempat umum, atau dengan makan bersama para warga. Namun hingar bingar pesta demokrasi ini, ternyata tidak diikuti dengan perubahan Perilaku politik para caleg dan pemilih yang semakin cenderung bertransaksi secara politik sehingga melahirkan Perilaku pragmatis para pemilih, terutama pemilih kalangan bawah. Karakter Perilaku politik ini berkaitan dengan semakin tingginya data tawar pemilih untuk memberikan suara kepada salah satu caleg dengan latar belakang parpol dengan para caleg yang berupaya keras untuk merayu para pemilih pragmatis.

Menarik untuk disimak hasil survei terbaru yang dilakukan CSIS menunjukkan gejala menarik yaitu sebanyak 81 persen dari konsituen tidak tahu atau tidak mengenali anggota parlemen daerah pemilihan (dapil) mereka (Vermonte, 2014). Ketidaktahuan konsituen dengan wakil rakyatnya ini dapat dikatakan sebagai bentuk kegagalan sistem demokrasi perwakilan. Seyogyanya konsituen harus mengenal lebih dekat tentang sosok para wakil rakyatnya di parlemen sebagai bentuk hubungan politik parpol dengan para pendukungnya, karena fungsi parpol sebagai sarana komunikasi politik antara rakyat dengan pemegang kekuasaan. Ada dua fungsi dasar parpol yang harus dipenuhi oleh wakil mereka di parlemen, yaitu fungsi legislasi yang

bertugas membuat Undang-undang sebagai bentuk kebijakan publik yang dilahirkan dari mekanisme politik sebagai hasil dialog dengan konsituen di lapangan, terutama yang merasakan permasalahan dalam kehidupan kenegaraan dan fungsi representasi yang merupakan makna keterwakilan wakil rakyat untuk memperjuangkan segala aspirasi konsituennya terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Demokrasi langsung yang terjadi selama dua dekade ini telah melahirkan kehidupan politik yang mengarah pada kebebasan dalam menentukan calon pemimpin negara sebagai jawaban terhadap penyelenggaraan politik oligarkhi. Walaupun demokrasi di Indonesia berjalan secara prosedural, namun kualitas para pemilih makin bergeser pada Perilaku politik transaksional. Sangat menarik untuk melihat sisi ini, terutama menyoroti Perilaku politik parpol, para caleg dan pemilih pada masa kampanye dan pada saat pemilihan suara. Para caleg yang melakukan transaksi politik dengan para pemilih didasarkan pada pertimbangan pragmatis yang bertujuan untuk memperoleh suara guna memenangkan pertarungan dalam memperebutkan kursi di parlemen lokal.

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) mengapa terjadi perilaku politik transaksional dalam pemilihan umum legislatif? 2) mengapa pemilih cenderung berperilaku pragmatis dalam menghadapi Pemilu legislatif?

C. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sistem politik demokrasi, Parpol menjadi penghubung politis antara pemilik kekuasaan, yaitu rakyat, dengan pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan. Fungsi utama Parpol adalah untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, melakukan pendidikan politik ke masyarakat tentang hak dan kewajiban warga Negara dalam kehidupan bernegara; melakukan rekrutmen politik secara demokratis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengisi jabatan publik di semua tingkatan pemerintahan; memformulasikan dan menetapkan kebijakan umum melalui institusi legislatif dan eksekutif di semua tingkatan pemerintahan; melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik melalui para kadernya di lembaga legislatif; menjadi penengah antara kepentingan/aspirasi rakyat dengan pemerintah beserta kebijakannya dan

menjadi alat pengontrol kepentingan pribadi politisi yang duduk sebagai wakil rakyat maupun pejabat politik (Maurice Duverger, *Political parties: Their organization and Activities in The Modern State*, Methuen: London, 1954. dalam Nico Harjanto, 2011:140).

Pada sisi lain Parpol adalah ruang publik yang besar dalam konteks Negara dan lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana individu adalah bagian dari ruang public dalam lingkup parpol (Piliang, 2008:260). Ungkapan klasik yang populer yaitu, *Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely* (Lord Acton, 1887, dalam J Kristiadi, 2011). Kekuasaan mempunyai dua tabiat yang kontradiktif secara diamtral satu sama lain, yaitu daya pesona yang luar biasa, tetapi sekaligus mempunyai kecenderungan merusak, apalagi kalau kekuasaan absolute, pemegang kekuasaan pasti akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Daya pikat kekuasaan semacam itu mengakibatkan pertarungan memperebutkan kekuasaan menjadi sangat rawan terhadap tindakan yang menghalalkan segala cara. Albert Hirschman meyakinkan bahwa nafsu manusia, termasuk nafsu kekuasaan (yang merusak) hanya dapat ditundukkan oleh nafsu lain yang lebih rendah daya rusaknya, yaitu kepentingan pribadi (self interest), terutama kepentingan ekonomi (kemakmuran) (1997, *The Passion and the interest: political argument for Capitalist Before Its Trial*, Princenton University Press, New Jersey). Watak kekuasaan ini, mengakibatkan pertarungan memperebutkan kekuasaan menjadi sangat rawan terhadap tindakan yang menghalalkan segala cara, mulai dari bujuk rayu, intimidasi sampai dengan tekanan fisik. Demokrasi hanya menjadi sekedar pertarungan perebutan kekuasaan demi kepentingan transaksional, akan dapat menceraabut posibilitas politik sebagai upaya membangun kehidupan bersama yang lebih beradap.

Menurut Alhumami, (2011) korupsi politik adalah ketika pejabat Negara menyalahgunakan kekuasaan atau menyelewengkan otoritas dan wewenang untuk meraih keuntungan pribadi. Bentuk korupsi politik seperti: (i) pengambilan dana publik yang menjadi sumber pendapatan Negara, (ii) penggelapan pajak, (iii) penyunatan anggaran pembangunan, (iv) permintaan komisi untuk proyek yang didanai pemerintah (v) penyuaipan untuk memuluskan proses legislasi, pembuatan kebijakan public, dan persetujuan anggaran belanja Negara. Baharuddin Thahir (2009), pejabat publik dalam lingkungan legislatif, akan melihat kedudukan sebagai alat, bukan tujuan. Oleh karena itu kode etik mengandaikan bahwa para pejabat public dapat berperilaku sebagai pendukung nilai moral dan sekaligus pelaksana dari

Perilaku Politik Transaksi Calon Legislatif

nilai tersebut dalam tindakan nyata. Menurut Frederickson dan Hart (1984) bahwa pejabat publik harus memiliki moral filsuf dan aktivitas moral yang baik, yang memerlukan pemahaman dan kepercayaan terhadap nilai rejim, dan rasa kebajikan yang luas bagi orang-orang bangsa. Ary Dwipayana dan Ari Sujito (dalam Perkasa, 2012), migrasi politik lebih sering dipicu hal-hal yang bersifat transaksional dan pragmatis. Perpindahan politisi ke partai lain terjadi bukan karena perbedaan ideologi tapi politisi tersebut gagal memperebutkan posisi atau jabatan strategis dalam parpol. Oleh sebab itu dalam memperebutkan kursi dalam pertarungan di gelanggang Pemilihan Umum para caleg tidak segan menggunakan cara dan jalan pintas termasuk dengan melakukan politik uang, seperti dikatakan oleh Syarif (2009:131) bahwa:

goods used in indirect money politics payment are those possessing high use value, as well as high exchange value. It is thus understandable that products included in the "nine basic needs" have become prime commodities used as indirect money political payments. While the candidates also present other goods, they are more contextual, since the goods given must be adjusted to the specific needs of the target group. To get a more comprehensive picture of this matter. Direct money politics is generally in the form of cash payment given by candidates for local government head positions to individuals or institution. The value differs from to area (Syarif, 2009: 130).

Politik uang masih merebak di segala tingkatan pada Pemilu, dengan mudah menjumpai politik uang dalam segala bentuknya, seperti pemberian sembako, bantuan materi hingga pemberian uang. Akibatnya para caleg yang maju dalam Pemilu sebagai calon pemimpin hanya terbatas dari kalangan yang memiliki sumber dana ekonomi yang besar. Ada kecenderungan bahwa mereka yang menjadi kandidat dalam berbagai jenjang Pemilu bukan karena kapasitas dan kapabilitasnya sebagai politisi yang mengakar dan memahami atau mempresentasikan aspirasi rakyat. Akan tetapi karena memiliki uang maka mereka dapat menjadi caleg (Nugroho, 2009). Semakin banyak para kandidat menginvestasikan modal sosial, budaya dan ekonomi dalam kampanye maka akan semakin banyak modal politik yang diperolehnya dan ini merupakan pintu masuk untuk merebut kekuasaan politik. Sistem politik dipandang sebagai "faktor hulu" penentu kemajuan bangsa, sedangkan faktor hilirnya dapat ditelusik dari kemajuan masyarakat

di bidang pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan ekonomi, dan rasa aman bagi seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, rekrutmen caleg dapat dipandang sebagai faktor tengah dalam hubungan “hulu-hilir” sistem politik Indonesia (Pranaji, 2009). Jika rekrutmen caleg yang terjadi hanya mengandalkan pertarungan materi, maka dalam praktik politiknya akan sangat sulit untuk menghindari munculnya transaksi politik dalam Pemilu. Kecenderungan ini dapat dibuktikan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, di mana Parpol telah memulai terlebih dahulu dengan bertransaksi untuk duduk dalam pengurusan partai, dilanjutkan dalam penetapan caleg, dan untuk memenangkan pertarungan caleg justru melakukan transaksi politik dengan para pemilih.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui Perilaku politik transaksional calon legislatif dan pemilih dalam pemilihan umum legislatif.

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini meliputi beberapa langkah dan prosedur penelitian yaitu untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dirancang untuk menggali data kualitatif melalui pengumpulan data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari sumber data yang terkumpul melalui pusat data local sedangkan data primer dikumpulkan melalui data empiric di lapangan. *Research procedure which is applied almost automatically in empirical research. Whenever an investigator finds himself faced whih the relationship between two variables he immedialtely starts to ‘cross-tabulate”, to consider the role of further variables* (Sandhya Neelam, 2008:37).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari daftar pemilih, daftar caleg yang bersumber dari PPK di kecamatan Sako dan dari KPU Kota Palembang. Data primer meliputi data yang bersumber dari pengamatan peneliti di lapangan yang meliputi lokasi pemilihan di TPS dan lokasi pembangunan jalan dan lorong sebagai hasil transaksi politik. Informasi wawancara mendalam dari para informan yang meliputi 4 orang caleg, 4 orang tokoh

masyarakat (para ketua RT), 8 orang pemilih yang dibagi menjadi pemilih usia tua dan muda, serta pemilih laki-laki dan perempuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a) **Pengamatan (Observasi)**

Kegiatan pengamatan dilakukan terhadap aktivitas warga dalam bertransaksi terhadap caleg mulai dari perencanaan pembangunan jalan dan lorong hingga pelaksanaannya. Pengamatan juga dilakukan terhadap bangunan fisik jalan dan lorong yang telah selesai dibangun. Pengamatan selanjutnya dilakukan dengan mengamati pemilihan umum di enam tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sasaran penelitian, mulai dari pelaksanaan pencoblosan hingga kegiatan perhitungan suara.

b) **Wawancara Mendalam**

Kegiatan menghimpun data dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan kuncitokoh masyarakat, seperti ketua RT dan masyarakat Kompleks Bumi Sako Damai, dan masyarakat kelurahan Sako khususnya RT 01, RT 02, RT 03 dan beberapa pemilih yang dipilih secara acak. Selain itu akan dilakukan wawancara sambil lalu dengan beberapa informan sebagai pemilih berdasarkan usia (tua dan muda, serta laki-laki dan perempuan). Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai Perilaku politik transaksional dan kecenderungan Perilaku politik dalam menentukan pilihannya. Wawancara dilakukan secara informal dengan tokoh masyarakat, pemilih dan beberapa caleg dengan menggunakan instrument pendukung yaitu pedoman wawancara yang memuat poin penting yang harus digali lebih dalam.

c) **Teknik Analisa Data**

Data dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan interpretasi verstehen. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan Perilaku politik transaksional para caleg dan pemilih yang dibantu dengan menampilkan data berdasarkan tabel frekuensi sederhana, sedangkan pendekatan interpretasi verstehen dipilih bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh agar dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dalam penelitian ini.

E. PERILAKU POLITIK PEMILIH

Perilaku pemilih dalam berinteraksi dengan caleg dilakukan dalam berbagai aktivitas yaitu dalam menentukan materi apa yang disepakati untuk kepentingan para warga dengan menawarkan sejumlah keinginan yang dapat dipenuhi oleh si caleg. Penawaran ini dilakukan oleh ketua RT atau beberapa orang tokoh masyarakat dengan menemui si caleg yang diharapkan dapat mengabulkan permintaan warga. Hasil pertemuan pertama antara ketua RT atau tokoh masyarakat dengan caleg menghasilkan apa yang diminta warga dan berapa suara yang dapat disumbangkan warga sebagai pemilih kepada caleg tersebut. Setelah itu dilakukan peninjauan ke lokasi yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan mengirimkan tim untuk mengukur jalan yang akan dibangun.

Tabel 1.
Perilaku Kesepakatan antara Caleg dengan Pemilih

Jenis Materi	Luas	Lokasi	Nama Caleg
Jalan kompleks perumahan	200mx4m	Kompleks BSD	Riki Rohima
Jalan kompleks perumahan	700mx4m	Kompleks BSD	Ning Zahara
Jalan setapak cor beton	25mx3m	RT.02	Riki Rohima
Jalan stapak cor beton	30mx2m	RT.02	Riki Rohima
Jalan Lr. M.Nur Dollah	130mx3m	RT.02	Riki Rohima
Jalan Lr. Kenanga I	100mx3m	RT.02	Riki Rohima
Jalan Lr. Melati	400mx3m	RT.02	Riki Rohima
Jalan Lr. H. Basirod	200mx3m	RT.02	Riki Rohima

Sumber: Wawancara tokoh masyarakat, 1 April 2014

Dari Tabel 1 dapat dilihat sebaran pembangunan jalan yang telah direalisasikan sebagai bentuk dari transaksi politik antara warga sebagai pemilih dengan caleg yang berhasil disepakati bersama. Caleg memberikan materi berupa pembangunan jalan, sedangkan warga sebagai pemilih memberikan suara. Jalan dan lorong yang dibangun dengan cor beton dilakukan dengan pendanaan caleg sendiri, yaitu atas nama Riki Rohima pada tiga jalan di Kompleks BSD dan RT. 02, dan empat lorong di RT. 02. Caleg atas nama Ning Zahara membangun jalan cor di Kompleks BSD dengan menggunakan dana pemerintah kota Palembang, karena Ning Zahara adalah caleg dari unsur incumbent, sehingga dapat menekan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mengarahkan pembangunan jalan cor ke lokasi yang dijadikan sasarannya.

Perilaku Politik Transaksi Calon Legislatif

Tabel 2
Perolehan Suara Caleg DPRD Kota Palembang Dapil Sako

Nama Caleg	Partai Politik	Perolehan Suara per TPS					
		TPS01	TPS02	TPS03	TPS 70	TPS 71	TPS 72
RIKI ROHIMA	Partai PKB	1	88	4	21	20	22
NING ZAHARA	PAN 1	2	-	1	82	0	5
BUNYANI	PAN 2	6	7	6	10	5	13
JOHN HARNO	GERINDRA	31	88	35	2	1	3

Sumber: TPS Kelurahan Sako, 9 April 2014

Perolehan suara caleg yang bertarung memperebutkan tujuh kursi di daerah pemilihan (dapil) Sako tergambar pada Tabel 2. Riki Rohima dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 hanya mendapatkan 156 suara di 6 TPS. Ning Zahara dari Partai Amanat Nasional Nomor urut 1 memperoleh 90 suara, sedangkan Bunyani dari Partai yang sama dengan nomor urut 2 hanya mendapat 47 suara dan John Harno dari Partai Gerindra mendapat 160 suara. Walaupun hasil perhitungan suara hanya pada 6 TPS di kelurahan Sako, namun telah menggambarkan peta perolehan suara secara keseluruhan pada Dapil Sako seperti yang disajikan pada tabel 5.3 tentang peta perolehan suara akhir berdasarkan rapat pleno PPK Kecamatan Sako.

Dari hasil rapat pleno ini dapat dilihat perolehan suara masing-masing caleg, di mana ketiga caleg gagal meraih kursi, dan satu-satunya caleg yang meraih kursi di DPRD Kota Palembang adalah John Harno dari Partai Gerindra Nomor urut 1 dengan suara sebanyak 4784. Capaian perolehan suara ini dapat dilihat dari dua aspek, pertama Perilaku caleg, yaitu caleg yang melakukan transaksi politik dengan para pemilih, tentu akan dipilih sesuai dengan kesepakatan hasil transaksi. Caleg Ning Zahara bertransaksi dengan pemilih dari warga RT 97 Kompleks Bumi Sako Damai berhasil memperoleh 82 suara di TPS RT. 97. Begitu juga dengan caleg Riki Rohima berhasil memperoleh suara 88 di TPS RT 02 karena telah bertransaksi dengan warga RT.02 kelurahan Sako, sedangkan John Harno yang bertransaksi dengan warga RT.02 juga memperoleh 88 suara. Caleg Bunyani yang tidak melakukan transaksi politik dengan para warga memperoleh suara yang kecil. Dari sebaran suara membuktikan bahwa transaksi politik antara caleg dengan pemilih memang memberikan sejumlah suara sebagai bentuk pertukaran pemberian materi dengan suara. Secara rinci perolehan suara masing-masing caleg disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Perolehan Suara Akhir Caleg

Nama Caleg	Partai Politik	Perolehan Suara	Status
RIKI ROHIMA	Partai PKB	3685	Gagal
NING ZAHARA	PAN 1	2176	Gagal
BUNYANI	PAN 2	1190	Gagal
JOHN HARNO	GERINDRA	4784	Terpilih

Sumber: PPK Kecamatan Sako, 2014

F. PERILAKU POLITIK TRANSAKSIONAL

Menurut Ketua Mahkamah Konsitusi, Hamdan Zoelva (2011), perilaku politik para elit politik peserta Pemilu ini tentunya juga memengaruhi perilaku politik masyarakat pada umumnya. Masyarakat semakin menerima penyimpangan-penyimpangan dalam pemilu sebagai sebuah kewajaran, sehingga menjadi permisif terhadap hal tersebut. Praktik politik uang, intimidasi, maupun pengerahan massa tentunya tidak akan terjadi dalam cakupan yang luas apabila masyarakat melakukan penolakan dan apabila fakta kemudian menunjukkan praktik penyimpangan tersebut tidak memunculkan hasil yang diharapkan. Dalam masyarakat yang permisif seperti ini sulit diharapkan timbulnya politik bersih dalam pelaksanaan demokrasi. Jika kondisi dan praktik politik buruk ini dibiarkan, maka akan tumbuh menjadi budaya politik yang buruk dan membahayakan kelangsungan sistem pemerintahan demokrasi yang dianut. Politik transaksional terjadi dengan sangat masif dan vulgar, para pemilih tidak segan-segan untuk “menjual” suaranya dalam bentuk materi dan uang, sehingga sudah menjadi rahasia umum jika para caleg yang bertarung harus mengikuti pola para pemilih yang akan berjanjinya setelah memperoleh “sesuatu” dari para caleg. Hal inilah yang menyebabkan karakter pemilih rasional makin jauh dari harapan. Politik *wani piro* (berani bayar berapa) sudah melekat dihati para pemilih, mereka secara terang-terang meminta sesuatu dan bertransaksi guna memperoleh materi sebelum janji pencoblosan caleg waktu hari pemungutan suara. Bagi caleg yang memiliki modal tebal, politik transaksional ini akan mudah untuk direalisasikan dengan menebarkan materi kepada calon pemilih berupa benda bernilai seperti sembako yang sudah mulai disebar para caleg dengan jumlah 3 kg sampai 10 kg, dan uang yang biasanya disebar menjelang waktu pemilihan atau dikenal dengan “serangan fajar”. Bagi caleg incumbent

Perilaku Politik Transaksi Calon Legislatif

(pentahana) memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan program pembangunan yang dibiayai negara, kemudian diwujudkan dalam bentuk pembangunan jalan, rehab rumah, mengaliri listrik, membuat tendon air, saluran air, rehap pasar tradisional, dan banyak lagi wujud kreatif program pemerintah yang diselimuti oleh pengakuan bahwa para caleg yang masih berada di parlemen telah memperjuangkan pemberian nyata kepada rakyatnya. Realisasi berbagai wujud pembangunan ini bukan tanpa penagihan atau dengan keikhlasan untuk membangun, namun dibarengi dengan permintaan untuk memilih dirinya waktu pemilihan nanti sebagai bentuk transaksi politik. Akan kesulitan bagi caleg yang bermodal kecil dan bukan incumbent. Caleg dari kalangan ini harus mengeluh karena tidak dapat akses untuk mengelontorkan program pemerintah karena belum memiliki kuasa guna menekan pengambil keputusan yang dapat menurunkan bantuan program, sedangkan untuk mengeluarkan biaya sendiri akan memberatkan karena harus menanggung kucuran dana yang tidak sedikit. Bisa jadi calon kalangan ini berasal dari orang yang cukup rasional dan bekerja secara politik yang menjanjikan perbaikan sistem dan kebijakan program pembangunan yang berpihak kepada rakyat jika terpilih nanti. Akan tetapi, caleg tidak dapat meyakinkan publik pemilih disebabkan karena Perilaku pragmatis para pemilih yang terjebak dengan pemberian bantuan caleg. Dalam kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 di daerah pemilihan (dapil) Sako, berdasarkan data penelitian, dari ke empat caleg yang bertarung, ternyata yang berhasil duduk sebagai wakil rakyat pada DPRD Kota Palembang hanya satu orang, atas nama John Harno dari Partai Gerindra. Caleg ini secara politik memang telah lama melakukan pendekatan kepada pemilih, yaitu sejak yang bersangkutan terpilih pada Pemilu legislative tahun 2009, yaitu dengan melakukan hubungan dengan para pemilih berupa pemberian bantuan pada saat setiap warga yang melakukan hajatan (perkawinan, sunatan, pencukuran, maupun kematian), bantuan lain diberikan berupa pertolongan kepada beberapa warga yang anaknya akan masuk sekolah. Kondisi ini yang diingat warga pada saat caleg ini meminta bantuan untuk memberikan suaranya pada Pemilu legislative 2014. Namun yang justru menguatkan caleg ini memenangkan pertarungan adalah Perilaku transaksi politik berupa pemberian uang (money politic) kepada para warga yang memilihkan dengan besaran uang Rp 50.000,- sampai Rp. 100.000,-. Perilaku transaksi politik uang semakin membuktikan bahwa para pemilih cenderung melihat apa yang mereka dapati secara langsung, maka suara akan diberikan kepada caleg

yang memberikan. Artinya materi langsung yang diberikan akan sangat efektif dalam meraih suara ketimbang materi tidak langsung seperti pembangunan jalan cor, dan materi lain, seperti yang diberikan oleh dua orang calon (Ning Zahara dan Riki Rohima). Pembangunan jalan ternyata tidak begitu efektif dalam meraih suara pemilih. Pemilih menjadi semakin pragmatis karena disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, warga masyarakat belum merasakan secara signifikan hasil pembangunan yang merupakan produk dari kebijakan publik, karena masih banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kehidupannya seperti semakin sulitnya mencari pekerjaan yang layak hingga berbagai fasilitas publik (jalan, angkutan umum, terminal, pasar, tempat parkir, dsb) yang masih belum memuaskan publik. Kedua, Perilaku para wakil rakyat yang masih jauh dari sikap negarawan yang justru menampakkan kehidupan kelas atas dan banyaknya permasalahan Perilaku wakil rakyat seperti pelanggaran moralitas, korupsi, hingga tingkat disiplin yang rendah dalam mengikuti rapat di parlemen lokal. Ketiga, sistem reses yang merupakan mekanisme komunikasi antara wakil rakyat dan konsituen tidak berjalan baik dan cenderung formalistik, sehingga persoalan yang dihadapi publik sering kali terabaikan, bahkan saluran komunikasi politik terpaksa dilakukan di jalanan dengan cara berdemonstrasi. Kondisi inilah yang menyebabkan para pemilih cenderung meminta sesuatu kepada para caleg pada saat terjadi mekanisme pergantian wakil rakyat di parlemen dengan melakukan tawar menawar politik kepada para caleg. Perilaku ini sebenarnya sangat merugikan pemilih karena dengan hanya di berikan sesuatu, mereka dianggap sudah dibeli oleh caleg, yang jika terpilih nanti tidak akan terjadi kewajiban untuk membalasnya dalam bentuk kebijakan program pembangunan yang berpihak pada warga. Kerugian ini semakin bertambah karena pemilih hanya dijadikan alat transaksi politik untuk merebut dan menguasai kekuasaan selama lima tahunan, dan pemilih pragmatis hanya kebagian tontonan para wakil rakyatnya yang bergaya hidup mewah dan berPerilaku menyimpang.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku politik transaksional terjadi karena warga masyarakat pemilih belum merasakan secara signifikan hasil pembangunan yang merupakan produk dari kebijakan publik, Perilaku para

wakil rakyat yang masih jauh dari sikap negarawan dan banyaknya permasalahan Perilaku negatif wakil rakyat seperti pelanggaran moralitas, korupsi, hingga tingkat disiplin yang rendah. Dalam kondisi seperti ini maka para pemilih menggunakan kesempatan untuk meminta “materi” kepada caleg sebagai bentuk transaksi politik untuk ditukar dengan suara.

2. Perilaku pragmatis para caleg dan pemilih terjadi karena disebabkan oleh kegagalan dalam pendidikan politik para caleg yang seharusnya dilakukan oleh partai politik dan pendidikan politik yang seyogyanya menjadi tanggung jawab Negara.

Saran dalam penelitian ini adalah untuk mencegah dan mengurangi politik transaksi diperlukan reformasi dan pemberdayaan partai politik serta pendidikan politik warga secara berkesinambungan, agar pemilih semakin cerdas dalam setiap pesta demokrasi. Pemberdayaan partai politik sebaiknya dilakukan melalui perubahan Undang-undang Partai Politik yang menekankan reformasi fungsi partai politik. Sedangkan pendidikan politik warga dapat dikembangkan melalui peran pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan untuk pemilih pemula.

DAFTAR PUSTAKA

- Amich Alhumami. 2011. Korupsi, Kekuasaan, dan Patronase Politik. Dalam *Jurnal Analisis CSIS* Volume 40 No. 1. CSIS: Jakarta.
- Baharudin Thahir. 2009. Eksistensi Dewan perwakilan Rakyat Daerah: Upaya Membangun Etika Politik dan Komunikasi Politik Partisipatif. Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Edisi 31. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia: Jakarta.
- Hamdan Zoelva. 2011. Membangun Politik Bersih Bersumber Akar Budaya. Artikel diakses di <https://www.facebook.com/notes/iyek-kolo/membangun-politik-bersih-bersumber-akar-budaya/10150455396579746>
- Heru Nugroho. 2009. Menerobos Lingkaran Involusi Politik di Indonesia. Dalam *Jurnal Analisis CSIS* Volume 38 No. 3. CSIS: Jakarta.
- Indra J. Piliang. 2008. Partai Politik dan Demokrasi Deliberatif. Dalam *Jurnal Analisis CSIS* Volume 37 No. 2. CSIS: Jakarta.
- J. Kristiadi. 2011. Politik Bermartabat, Meluruskan Reformasi Sesat. Dalam *Jurnal Analisis CSIS* Volume 40 No. 4. CSIS: Jakarta.

PROCEEDING KONFERENSI NASIONAL SOSIOLOGI III

- Luky Djani. 2012. Demokrasi Prabayar. Dalam *Jurnal Analisis CSIS* Volume 41 No. 1. CSIS: Jakarta.
- Nico Harjanto. 2011. Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indoensia. Dalam *Jurnal Analisis CSIS* Volume 40 No. 2. CSIS: Jakarta.
- Sandhya Neelam, 2008. *Research Methodology in Sociological Research*. Manglam Publications: New Delhi.
- Syarif Hidayat. 2009. Pilkada, Money Politics and the Dangers of “Informal Governance” Practices. Dalam *Deepening Democracy in Indonesia*. Edited by Maribeth Erb and Priyambudi Sulistiyanto. Institute of Southeast Asian Studies: Singapura.
- Tri Pranadji. 2009. Revitalisasi Sistem Politik untuk Kemajuan Bangsa. Dalam *Jurnal Analisis CSIS* Volume 38 No. 4. CSIS: Jakarta.
- Vidhyandika Djati Perkasa. 2012. Bola Panas Menjelang Pemilu 2014: Kegaduhan Politik dan Konflik Internal Partai Politik. Dalam *Jurnal Analisis CSIS* Volume 41 No. 4. CSIS: Jakarta.